

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERAPAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG**
(Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang)

Artikel



FIKO FERDIAN ISMET
2015 / 15043123

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintahan di Kota Padang

Fiko Ferdian Ismet
Jurusan Akuntansi, FE, UNP
vikoverdian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variable sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada OPD Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasinya yaitu 40 OPD di Kota Padang. Sampelnya terdiri dari 2 orang masing masing OPD yaitu kepala dan staf bagian keuangan yang totalnya berjumlah 80 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument kuisisioner menggunakan skala likert. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 16. Adapun hasil penelitian ini yaitu SDM dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP basis akrual di Kota Padang. Teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP basis akrual di Kota Padang. Besarnya kontribusi variable independen adalah sebesar 41,1 %.

Keyword : SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi, komunikasi, basis akrual

Perubahan dalam pengelolaan keuangan negara masih terus dilakukan di bidang kelembagaan, organisasi dan manajerial di sektor publik untuk peningkatan terhadap efisien, efektif dan akuntabilitas keuangan. Perubahan ini merubah sistem manajemen sektor publik menjadi lebih mengakomodasi pasar dan fleksibel, yang kita kenal dengan istilah "*New Public Management*" dan singkatannya NPM..

Pengadopsian NPM di Indonesia diawali dengan ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang. Ketentuan dalam salah satu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Dengan Penetapan PP 71 Tahun 2010 maka SAP basis akrual telah mempunyai landasan hukum. dalam hal ini Pemerintah memiliki kewajiban untuk segera melakukan penerapan SAP basis akrual yang baru ini. Penerapannya secara penuh yang diundur sampai tahun 2014.

Penerapan SAP membawa perubahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang sebelumnya menggunakan standar akuntansi berbasis kas dan sekarang telah menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. Perubahan signifikan dari akuntansi pemerintahan di Indonesia yaitu saat penerapan akuntansi berbasis kas pencatatan transaksi dan pengakuan terjadi hanya saat kas keluar dan kas masuk dan sama sekali tidak mencatat kewajiban serta aset. Sementara basis akrual mencatat dan mengakui semua transaksi pada saat itu juga terjadi dan mencatat semua aset dan kewajiban.

SAP basis kas menuju akrual yang akan dikembangkan di Indonesia yaitu menggunakan SAP basis akrual dalam pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pada neraca dan menggunakan SAP basis kas dalam pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran (Binsar)

Dalam pengimplementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual yang telah direalisasikan tahun 2015, maka setiap pemerintah daerah harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Pramono Dkk dalam Endang, (2015), Basis akuntansi merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Keberhasilan suatu pemerintahan dalam penerapan basis akrual yaitu dengan menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. WTP diterima apabila pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut jelas dan lengkap serta dapat dijadikan laporan keuangan itu sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan oleh penggunaanya atau kepala pemerintahan.

Dalam merealisasikan penerapan akuntansi berbasis akrual, pemerintah seharusnya melakukan perbaikan dari segi sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kompetensi menjadi salah satu masalah yang sering terjadi pada pemerintahan dalam mewujudkan laporan keuangan yang handal. Hal ini juga yang sering menyebabkan laporan keuangan sering kali tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut jelas saja membutuhkan sumber daya

manusia yang menguasai tentang akuntansi pemerintahan.

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah ini masih baru. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual ini merupakan proses yang berkelanjutan dan terpadu. Efek yang akan dihasilkan dari penerapan tersebut tidak bisa kita lihat dalam waktu singkat. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dalam keberhasilan atau kegagalan pada pengenalan sistem akuntansi yang baru di sektor publik ini sangatlah penting.

Keberhasilan atau kegagalannya dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi. Kota Padang telah mendapatkan opini WTP dari BPK dan penulis sempat melakukan wawancara dengan salah satu pegawai bagian akuntansi di OPD Kota Padang yang menyatakan bahwa masih ada kekurangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di Kota Padang yaitu pada kualitas sumber daya manusia dan penyampaian informasi.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik menguji kembali sejauh mana penerapan akuntansi berbasis akrual di Kota Padang dengan pengaruh faktor faktor sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual di Kota Padang. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul **“Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan**

Akuntansi Basis Akrual pada Pemerintahan di Kota Padang”.

2. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh faktor sumber daya manusia terhadap penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintahan Kota Padang?
2. Sejauhmana pengaruh faktor komitmen organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintahan Kota Padang?
3. Sejauhmana pengaruh faktor teknologi informasi terhadap penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintahan Kota Padang?
4. Sejauhmana pengaruh faktor komunikasi terhadap penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintahan Kota Padang?

3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh faktor sumber daya manusia terhadap penerapan SAP basis akrual di Pemerintahan Kota Padang.
2. Mengetahui pengaruh faktor komitmen organisasi terhadap penerapan SAP basis akrual di Pemerintahan Kota Padang
3. Mengetahui pengaruh faktor teknologi informasi terhadap penerapan SAP basis akrual di Pemerintahan Kota Padang
4. Mengetahui pengaruh faktor komunikasi terhadap penerapan SAP basis akrual di Pemerintahan Kota Padang

5. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan penulis dalam mengetahui pengaruh faktor SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi terhadap penerapan SAP basis akrual di pemerintahan.
2. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan didalam melihat faktor yang mempengaruhi penerapan SAP basis akrual sehingga dapat menjadi pertimbangan dan acuan dalam hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan.

KAJIAN TEORI

1. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan.

2. Basis akuntansi akrual

Basis akuntansi akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. (KSAP dalam Faradillah, 2013). Basis akrual digunakan untuk menyusun Laporan Operasional (LO) dan Neraca, dan Laporan Realisasi

Anggaran disusun menggunakan basis kas. Apabila anggaran disusun menggunakan basis akrual, maka LRA juga disusun menggunakan basis akrual. Perbedaan yang paling mendasar pada basis akrual dengan basis kas terletak pada konsep pengakuan belanja dan pendapatan pada suatu periode.

Akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting) digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh (earned) dan biaya (expense) pada saat terjadi (incurred), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. (Mardiasmo, 2009)

3. Sumber Daya Manusia

Nawawi dalam Aldiani (2010) mengungkapkan ada tiga pengertian tentang SDM :

1. SDM yaitu manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi
2. SDM yaitu potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal dalam organisasi bisnis, yang dapat menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik untuk mewujudkan eksistensi organisasi.
3. SDM yaitu potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

Hal yang paling menonjol terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang tidak memadai menjadi masalah penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Contohnya dapat berupa sumber daya manusia yang tidak

kompeten dan cenderung tidak peduli terhadap perubahan yang ada.

4. Komitmen Organisasi

Komitmen merupakan bagian yang terkait dengan kinerja karyawan dalam hubungannya dengan pekerjaannya, dalam arti keinginan untuk melaksanakan tugas dalam hal pengelolaan keuangan daerah walaupun peraturan keuangan daerah sering berubah ubah (Azhar, 2007). Simanjuntak (2010) dan (Yogantara, 2012) dalam I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015) menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan dan kerjasama dengan pegawai merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Ritonga (2010) dan Halim (2012) dalam I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015) menyatakan harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama.

5. Komunikasi

Menurut I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015) komunikasi diantara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan secara berkesinambungan untuk mengatur dan melaksanakan standar yang baru. Maka dari itu, harus disusun beberapa kebijakan dan sosialisasi agar penerapan SAP yang baru bisa berjalan dengan baik.

6. Teknologi Informasi

Teknologi informasi menurut William dan Sawyer dalam Haryanto (2012), yaitu istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi.

Teknologi informasi selain berupa hardware dan software

didalamnya yang digunakan sebagai alat proses dan menyimpan segala informasi, berfungsi juga sebagai teknologi komunikasi penyebaran informasi. Dalam PP No.71 Tahun 2010, SAP yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data ,pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Maka dari itu, teknologi informasi diperlukan dalam membantu SAP supaya terlaksana dengan baik.

7.Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh antara SDM dengan penerapan SAP basis akrual

(Nazier, 2009). Insani dalam Kusuma, (2013) mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan publik dalam praktiknya memerlukan kapasitas sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan keahlian disamping pengembangan kapasitas organisasi.

SDM memiliki peranan sentral dalam menentukan penerapan menunjukkan pelatihan yang cukup memadai dan memiliki dampak yang baik terhadap keberhasilan dalam pengadopsian sistem akuntansi.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015), Evans Sembada Sugiarto, Mohammad Alfian (2014), Endang Kristiawati (2015) menunjukkan bahwa SDM memiliki hubungan yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam menerapkan SAP basis akrual. Berdasarkan uraian diatas penulis menduga bahwa :

H1 : SDM berpengaruh positif terhadap penerapan pemerintah daerah dalam

penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

2. Pengaruh antara komitmen organisasi dengan penerapan SAP berbasis akrual

Menurut Aldiani (2010), Komitmen organisasi yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu supaya dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan mengutamakan kepentingan organisasi.

Komitmen organisasi berpengaruh pada keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual menurut penelitian I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015), Evans Sembada Sugiarto, Mohammad Alfian (2014), Endang Kristiawati (2015). Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, maka penulis akan menduga hipotesa sebagai berikut :

H2 : Komitmen Organisasi akan berpengaruh secara positif terhadap penerapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

3. Pengaruh antara komunikasi dengan penerapan SAP berbasis akrual

Komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi proses penerapan. Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif yaitu pelaksana kebijakan mengetahui yang mereka kerjakan, menyangkut proses penyampaian dan konsistensi informasi. (Edwar dalam herlina, 2013). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015) bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap penerapan PP 71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual. Berdasarkan hal ini penulis membangun hipotesis :

H3: Komunikasi berpengaruh secara positif terhadap penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP basis akrual.

4. Pengaruh antara teknologi informasi dengan penerapan SAP berbasis akrual

Azhar (2007) dan Indah (2008) dalam Evans Sembada Sugiarto, Mohammad Alfian (2014), berpendapat perangkat pendukung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Permendagri 13 dan PP no. 24 tahun 2005. Hal ini sejalan dengan hasil temuan penelitian Endang Kristiawati (2015) bahwa perangkat pendukung berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Sementara hasil penelitian Evans Sembada Sugiarto, Mohammad Alfian (2014) menunjukkan bahwa perangkat pendukung tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi basis akrual. Berdasarkan argumen ini maka penulis menduga hipotesis berikut :

H4 : Teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat asosiatif kausalitas yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Singkatnya penelitian ini mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Dalam hal ini melihat seberapa jauh pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, komunikasi dan teknologi informasi terhadap penerapan basis akrual di instansi pemerintah.

B. Populasi dan Sampel

Populasinya yaitu 40 OPD Kota Padang dan sebagai responden adalah staff akuntansi dari setiap OPD. Kriteria pemilihan staff akuntansi sebagai responden karena diharapkan mereka mengerti dan paham tentang implementasi SAP basis akrual yang masih baru dalam lingkungan kerja mereka, sehingga jawaban dari mereka bisa diandalkan. Total respondennya berjumlah 80 orang.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data

Jenis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah data subyek. Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini, dilakukan penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan pada responden berupa kuisisioner.

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel terikat pada penelitian ini

yaitu tingkat penerapan akuntansi akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Y).

2. Variabel Bebas (independent variable)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif ataupun negative bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi varibel bebas adalah Sumber Daya Manusia (X1), Komitmen Organisasi (x2), Komunikasi (X3) dan Teknologi Informasi (X4).

F. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan kuisisioner dengan pengukuran skala likert 4 alternatif jawaban. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrument yang Instrumen dalam variabel ini menggunakan lima buah pertanyaan yang sebelumnya telah digunakan dalam penelitian adventana (2009) dan azhar (2007). Variabel ini diukur dengan skala likert 1-4.

G. Model dan Teknik Analisis

1. Model Analisis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat penerapan akuntansi akrual

X1 = Sumber Daya Manusia

X2 = Komitmen Organisasi

X3 = Komunikasi

X4 = Teknologi Informasi

a = Konstanta

bX = slope regresi atau koefisien regresi dari XX

e = kesalahan residual

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 16,0 dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

2. Teknik Analisis

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance*. Jika $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas tapi jika $VIF > 10$ dan $tolerance < 0,1$ berarti terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas

dapat menggunakan uji Glejser. Dalam uji ini, apabila hasilnya $sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Uji Model

1) Uji F (F-Test)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga bisa dipastikan apakah model tersebut digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ dan $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis ini yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$

2) Uji koefisien determinan

Koefisien determinasi (*R square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. *Adjusted R square* berarti *R square* sudah disesuaikan dengan derajat masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan *Adjusted R square*. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai *Adjusted R square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel *independent* dalam menjelaskan variasi variabel *dependen* sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel *independen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi
dependen.

c. Uji Hipotesis (T-Test)

Uji hipotesis dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikan $< \alpha$ (0,05) dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H_0 pada pengujian hipotesis 1, 2, 3, 4 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima H_1, H_2, H_3, H_4
2. Jika tingkat signifikan $< \alpha$ (0,05) dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.
3. Jika tingkat signifikan $> \alpha$ (0,05) dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi yang ada dalam penelitian ini berjumlah 40 OPD di Pemerintah Kota Padang. Respondennya adalah kasubag dan staf keuangan dari masing masing OPD di Pemko Padang, yang berjumlah 80 responden.

Dari semua kuesioner yang disebarkan, ada 2 OPD yang tidak memberikan kembali kuisisioner yaitu DLH dan Capil. Total responden yang memberikan kembali yaitu 76 responden. Tapi dari 76 kuesioner yang diberikan kembali, hanya terdapat 67 responden yang dapat diolah, sementara sisanya tidak bisa diolah karena data identitas yang kurang dan jawabannya yang kurang lengkap.

B. Model Dan Teknik Analisis

1. Model analisis

Supaya kita dapat mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *Adjusted R Square*-nya, sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan variabel moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel independen dengan menggunakan SPSS 16.

2. Teknik analisis

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Residual

Dari hasil pengolahan SPSS diketahui bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,060 dengan signifikan $> 0,05$ yaitu 0,211. Dari hasil tersebut bisa dikatakan data yang digunakan pada penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa diteliti lebih lanjut.

2) Uji Multikolinearitas

Hasil dari nilai VIF yang didapatkan pada pengolahan data SPSS menunjukkan variabel bebas pada model regresi tidak saling berhubungan. Nilai VIF pada masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan tolerance value berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

b. Uji Model

1) Uji F (*F-Test*)

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang menggunakan SPSS dapat diketahui bahwa signifikansi adalah 0,000 atau kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah *fix*.

2) Uji koefisien determinasi

Dari tampilan *output* SPSS *model summary* besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,481. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel sumber daya manusia, komitmen organisasi, komunikasi dan teknologi informasi adalah sebesar 41.1%, sedangkan 58.9% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

3) Uji hipotesis (t-test)

1. Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan PP 71 tahun 2010.

Berdasarkan nilai t tabel pada $\alpha=0,05$ adalah 1,668, nilai t hitung untuk variabel sumber daya manusia (X_1) adalah 3,035 signifikan pada level 0,04. Kita bisa ketahui bahwa t hitung besar dari t tabel.yaitu $3,035 > 1,668$ (sig. $0,04 < 0,05$). Untuk melihat arahnya positif atau negatif yaitu pada koefisien β , pada tabel koefisien β positif sebesar 0,231. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (X_1) tidak berpengaruh terhadap penerapan PP 71 tahun 2010, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **ditolak**.

2. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan PP 71 tahun 2010.

Berdasarkan nilai t tabel pada $\alpha=0,05$ adalah 1,668, nilai t hitung untuk variabel sumber daya manusia (X_1) adalah 3,035 signifikan pada level 0,04. Kita bisa ketahui bahwa t hitung besar dari t tabel.yaitu $3,671 > 1,668$ (sig. $0,01 < 0,05$). Untuk melihat arahnya positif atau negatif yaitu pada koefisien β , pada tabel koefisien β positif sebesar 0,799. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi (X_2) tidak berpengaruh terhadap penerapan PP 71 tahun 2010, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **ditolak**.

3. Teknologi informasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan PP 71 tahun 2010.

Berdasarkan nilai t tabel pada $\alpha=0,05$ adalah 1,668, nilai t hitung untuk variabel teknologi informasi (X_3) adalah 0,578 signifikan pada level 0,566. Kita bisa ketahui bahwa t hitung kecil dari t tabel.yaitu $0,578 > 1,668$ (sig. $0,566 < 0,05$). Untuk melihat arahnya positif atau negatif yaitu pada koefisien β , pada tabel koefisien β positif sebesar 0,102. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi (X_3) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan PP 71 tahun 2010, dan hipotesis ketiga dalam penelitian ini **diterima**.

4. Komunikasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan PP 71 tahun 2010.

Berdasarkan nilai t tabel pada $\alpha=0,05$ adalah 1,668, nilai t hitung untuk variabel komunikasi (X_4) adalah 1,461 signifikan pada level 0,149. Kita bisa ketahui bahwa t hitung

kecil dari t tabel. yaitu $1,461 > 1,668$ (sig. $0,149 < 0,05$). Untuk melihat arahnya positif atau negatif yaitu pada koefisien β , pada tabel koefisien β positif sebesar $0,123$. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi (X_4) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan PP 71 tahun 2010, dan hipotesis keempat dalam penelitian ini **diterima**.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak dan disimpulkan bahwa SDM tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung besar dari t tabel yaitu $3,035 > 1,668$. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015), yang menyatakan bahwa SDM berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Tidak sejalan juga dengan penelitian Evans Sembada Sugiarto, Mohammad Alfian (2014) yang menunjukkan bahwa SDM berpengaruh positif terhadap penerapan SAP basis akrual dan temuan penelitian Endang Kristiawati (2015) yang menyatakan SDM merupakan faktor yang paling berperan pada penerapan keberhasilan SAP basis akrual.

Dari hasil ini bisa ditarik kesimpulan bahwa SDM tidak berpengaruh dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Kota Padang. Pegawai di OPD Kota Padang

secara garis besar telah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu akuntansi dan atasan pada umumnya berasal dari jurusan akuntansi. Atasan telah memahami tugas dan pekerjaannya dalam organisasi dan dapat memberikan pengarahan yang baik kepada bawahannya. Hal ini berdampak pada pegawai tersebut telah memahami pekerjaannya dan hasil pekerjaannya pun akan maksimal. Dalam hal ini fenomena di pemerintahan yaitu bahwa peraturan di pemerintahan sering berubah ubah dan jika sebagian besar pegawai yang telah berlatar belakang pendidikan sesuai dan memahami pekerjaannya maka pegawai tersebut tidak akan sulit dan lama untuk memahami setiap pekerjaannya dengan bantuan dan pengarahan yang baik dari atasannya, dan mereka akan siap terhadap perubahan. Hal ini akan berimbas pada hasil pekerjaannya yaitu laporan keuangan yang andal dapat disajikan tepat waktu. Hal ini telah berjalan dengan baik sebelum adanya perubahan penerapan SAP ke basis akrual.

2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Berdasarkan analisis statistik pada penelitian ini ditemukan hipotesis kedua (H_2) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3,671 > 1,668$. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi

berbasis akrual. Tidak sejalan juga dengan penelitian Evans Sembada Sugiarto, Mohammad Alfian (2014) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP basis akrual dan hasil temuan penelitian Endang Kristiawati (2015) yang menyatakan komitmen organisasi merupakan faktor yang paling berperan dalam penerapan keberhasilan akuntansi berbasis akrual.

Dalam hal ini dapat disimpulkan semua pegawai dan atasan telah memiliki komitmen yang baik terhadap organisasi dalam mengemban tugasnya yaitu menyajikan laporan keuangan yang andal tepat waktu. Atasan telah melakukan sosialisasi yang baik terhadap bawahannya terkait perubahan peraturan yang ada di pemerintahan. Dan juga dapat disimpulkan bahwa organisasi telah siap melakukan perubahan sebelum adanya perubahan SAP ke basis akrual ini. Komitmen organisasi di OPD Kota Padang ini telah berjalan dengan baik sebelum adanya penerapan akuntansi berbasis akrual.

3. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Berdasarkan analisis statistik pada penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H_3) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual tetapi tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $0,578 < 1,668$ dengan signifikan $0,566$. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Evans Sembada Sugiarto, Mohammad Alfian (2014), yang menyatakan bahwa teknologi

informasi berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Dan hal ini sejalan dengan hasil temuan penelitian Endang Kristiawati (2015) yang menyatakan komitmen organisasi merupakan faktor yang paling berperan dalam penerapan keberhasilan akuntansi berbasis akrual.

Dari tabel distribusi frekuensi teknologi informasi, TCR pada variabel ini adalah 77,80% dan dikategori cukup baik. Dari hasil ini bisa kita ketahui bahwa teknologi informasi yang dimiliki OPD Kota Padang dalam kategori cukup, dan teknologi informasi bisa mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang menunjang pegawai dalam kinerjanya sangat membantu agar mencapai hasil yang maksimal. Dan pegawai dapat menggunakan dan memanfaatkan perangkat yang ada tersebut dengan baik serta perangkat keras yang digunakan tersebut telah didukung dengan perangkat lunak yang terbaru yang semakin memudahkan pegawai dalam pekerjaannya.

4. Pengaruh Komunikasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual

Berdasarkan analisis statistik pada penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis keempat (H_4) komunikasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $1,461 < 1,668$ dengan signifikan $0,149$. Hal ini sejalan dengan penelitian I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015), yang menyatakan

bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual.

Dari tabel distribusi frekuensi komunikasi, TCR untuk variabel ini adalah 77,32% dan dikategori cukup baik, dari hasil ini kita bisa ketahui bahwa komunikasi yang dimiliki OPD Kota Padang dikategori cukup, dan komunikasi bisa mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang ada telah terjalin dengan bagus pada satuan kerja perangkat Kota Padang baik itu antar sesama pegawai, pegawai dengan atasan di dalam organisasi maupun antar organisasi satu dengan organisasi lainnya yang dapat berupa evaluasi kinerja, instruksi dari atasan maupun rapat koordinasi. Bagian pelayanan pun dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan pihak eksternal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang.
2. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang
3. Teknologi informasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang

4. Komunikasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang

B. Saran

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa faktor sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual dikarenakan SDM yang pada umumnya telah memadai pada OPD Kota Padang. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat terus mempertahankan hal ini dan menemukan solusi jika masih ada SDM yang belum memadai. Dan untuk faktor komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi telah berjalan dan terlaksana dengan baik. Diharapkan juga kedepannya pemerintah dapat mempertahankan hal ini agar kinerja dapat berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang maksimal.
2. Bagi peneliti lain yang tertarik meneliti judul yang sama, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya supaya bisa menambahkan dan menggunakan variabel lain, karena dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan dapat menjelaskan sebesar 41.1% dan 58.9% dijelaskan oleh faktor lain.

DAFTAR PUSTAKA

Adventana, G.A, 2010, *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP no 71 Tahun 2010*, Tesis Universitas Atmajaya, Yogyakarta

- Aldiani, Sulani, 2009, *Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 pada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu*, Simposium Nasional XII, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Azhar,2007, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri no 13 tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*, FE USU, Medan.
- Faradillah, 2013, *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010)*, E- Journal Universitas Palangkaraya, Palangkaraya
- Gibson, James, L., et . all. 1998, *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses, Alih bahasa*, Jakarta : Erlangga
- Hetti, Herlina, 2013, *analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010*, FE UNP, Padang
- I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra, 2015, *Faktor faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Bali
- Indriasari, Desi, dan Ertambang Nahartyo, 2008, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*, Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak
- Insani, Istyadi, 2010, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Organisasi Pemerintah*. Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bandung
- Kristiawati, Endang, 2015, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat*, Universitas Panca Bakti, Pontianak
- Kusuma M., I., Y., dan Fuad, 2013, *Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah*, Diponegoro Journal Accounting, Semarang
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi.
- Mohammad Alfian, Evans Sembada Sugiarto, 2014, *Faktor Faktor Pendukung atas Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan di Kota Solo*, Universitas Sebelas Maret, Solo
- Muhammad IndraYudha Kusuma, 2013, *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Pramono, Yanuar, Icuk Erlangga, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Robbins, Stephen P, 2006, *Perilaku Organisasi Edisi kesepuluh*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta
- Suwarjono, 2005, *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta, BPFE
- Syukriy Abdullah (2006), *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*, Jurnal Akuntansi

Pemerintah, ISSN : 0216-8642, Vol.
2, No 2, p. 17-32

_____, *Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jakarta.*

_____, *Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.*

_____, *Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.*

_____, *UU no. 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara.*

_____, *UU no. 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara.*

_____, *UU no. 15 tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.*